

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori *Stewardship*

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991) dalam Wahida (2015), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009 dalam Wahida, 2015) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) dalam Wahida (2015) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan

*principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

★ Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajemen

dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

## **2.1.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

### **2.1.2.1. Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Menurut Nordiawan (2008) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Bastian (2010) akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak

pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Wahida, 2015)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah kewajiban pemerintah kepada publik untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi.

#### **2.1.2.2. Jenis Akuntabilitas Publik**

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada

pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Rosjidi (2001), akuntabilitas dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintahan Negara termasuk juga pemerintahan yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah

diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Dari jenis akuntabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban yang dilakukan otoritas rendah kepada otoritas yang lebih tinggi atas pengelolaan sumber dana. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas. Akuntabilitas internal adalah pertanggungjawaban secara langsung bawahan kepada atasannya mengenai perkembangan kinerja aktivitasnya. Akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban seluruh amanat untuk dikomunikasikan kepada pihak luar.

#### **2.1.2.3. Dimensi Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum  
(*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas Kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas Proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Rasul (2002), dimensi akuntabilitas dibedakan menjadi lima yaitu:

##### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan kepada hukum dan peraturan lain yang menjadi syarat didalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin penegakan supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

##### 2. Akuntabilitas Program

Program organisasi sebaiknya adalah program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat sampai dengan pelaksanaan program.

### 3. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban untuk melaksanakan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Organisasi publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi kedepannya.

### 5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban lembaga publik dalam pemakaian dana publik (*public money*) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada kebocoran dana dan pemborosan dan juga korupsi.

Dapat disimpulkan bahwa dimensi akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas kejujuran terkait penghindaran penyalahgunaan jabatan yang menjamin adanya praktik organisasi sektor publik yang sehat dan akuntabilitas hukum terkait kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang terkait dengan penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas telah tercukupi, dapat dilihat melalui pemberian pelayanan publik yang

cepat, responsif, dan murah biaya. Akuntabilitas program (*program accountability*) terkait pertimbangan tujuan yang ditetapkan beserta pertimbangan alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal untuk lembaga publik. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) terkait pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi kedepannya. Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja terkait dengan pertanggungjawaban untuk melaksanakan pengelolaan organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban lembaga publik dalam pemakaian dana publik secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada kebocoran dana dan pemborosan dan juga korupsi.

#### **2.1.2.4. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Wahida (2015) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan terdiri dari:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum  
(*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas Kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas Proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### 2.1.3. Penyajian Laporan Keuangan

#### 2.1.3.1. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Nordiawan (2008), laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik

untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (Bastian, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Dari pengetahuan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan seluruh transaksi keuangan yang telah dilakukan suatu entitas baik sektor publik maupun swasta.

### 2.1.3.2. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka

untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan sektor publik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. Untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan

pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat serta berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi sektor publik secara lebih mendalam.

### **2.1.3.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik**

Menurut Nordiawan (2008) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik berikut:

#### **1. Relevan**

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan (*predictive value*) dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka (*feedback value*). Selain itu, suatu informasi dapat

dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Terkait hal itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, adapun karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu:

1. Relevan

Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh

pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan yaitu Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4. Dapat dipahami

Dapat dipahami yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu relevan, laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dan informasi disajikan tepat waktu dan lengkap. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain.

Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

#### 2.1.3.4. Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: (a) Saldo Anggaran Lebih awal; (b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; (c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; (d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan (e) Lain-lain; (f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

#### 4. Laporan Operasional

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; (b) Beban dari kegiatan operasional; (c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; (d) Pos luar biasa, bila ada; dan (e) Surplus/defisit-LO.

#### 5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: (a) Ekuitas awal, (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, (c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan (d) ekuitas akhir.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Menurut Bastian (2010) komponen laporan keuangan sektor publik meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca atau laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos sebagai berikut:

- a. Properti, pabrik dan peralatan
- b. Aktiva tidak berwujud
- c. Aktiva keuangan (selain butir d, f dan h)
- d. Investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas
- e. Persediaan
- f. Pemulihan transaksi non perukaran, termasuk pajak dan transfer

- g. Piutang dari transaksi pertukaran
- h. Kas dan setara kas
- i. Utang pajak dan transfer
- j. Utang karena transaksi pertukaran
- k. Cadangan (*provision*)
- l. Kewajiban tidak lancar
- m. Partisipasi minoritas
- n. Aktiva/ekuitas neto

2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)

Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit atau laporan laba rugi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu.

Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut:

- a. Pendapatan dari aktivitas operasi
- b. Surplus atau defisit dari aktivitas operasi
- c. Biaya keuangan (biaya pinjaman)
- d. Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan *joint venture* yang menggunakan metode ekuitas
- e. Surplus atau defisit dari aktivitas biasa
- f. Pos-pos luar biasa

g. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto

h. Surplus atau defisit neto untuk periode

### 3. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto

Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan ekuitas neto secara keseluruhan menyajikan total surplus/defisit neto selama suatu periode. Pendapatan dan biaya lainnya diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva/ekuitas neto dari setiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto meliputi:

a. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

b. Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada tanggal pelaporan, dan pergerakan selama periode

c. Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen asset/ekuitas neto pada

awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan

#### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

#### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan Sektor Publik

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.

Dari beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komponen dari laporan keuangan sektor publik meliputi Laporan Realisasi Anggaran, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Saldo Anggaran Lebih Akhir dan lain-lain secara komparatif dengan periode sebelumnya. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional, kegiatan operasional lembaga publik dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan sekurang kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau

mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir. Catatan Atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **2.1.3.5. Indikator Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Wahida (2015), indikator penyajian laporan keuangan meliputi:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, yaitu Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami, yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

#### **2.1.4. Aksesibilitas Laporan Keuangan**

##### **2.1.4.1. Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009).

Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 21 Tahun 2010).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan pengertian aksesibilitas laporan keuangan

adalah kemudahan dalam mengakses dan memperoleh informasi laporan keuangan yang dibuat oleh unit pemerintah.

Keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari UU No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Menurut Sande (2013) yang sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pemerintah daerah harus memenuhi beberapa hal yaitu: 1) Keterbukaan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa 2) Kemudahan, yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah 3) *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Aksesibilitas dalam organisasi sektor publik dapat ditingkatkan dengan dibuatnya Permendagri Nomor 3

Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk: (a) mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, (b) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Kesimpulannya Pemerintah Pusat telah membuat peraturan untuk mendukung keterbukaan informasi publik baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan penyediaan informasi secara terbuka kepada publik maka penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

#### **2.1.4.2. Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan (Wahida, 2015), yaitu:

1. Terbuka di media massa

Laporan Keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa sehingga pengguna laporan

keuangan terutama pihak eksternal dapat melihat secara langsung dari media cetak.

2. Mudah diakses

Pihak eksternal dapat mengakses informasi laporan keuangan melalui internet (*website*).

3. Ketersediaan informasi

Informasi laporan keuangan yang dipublikasi secara lengkap disampaikan terhadap pengguna laporan keuangan yang membutuhkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

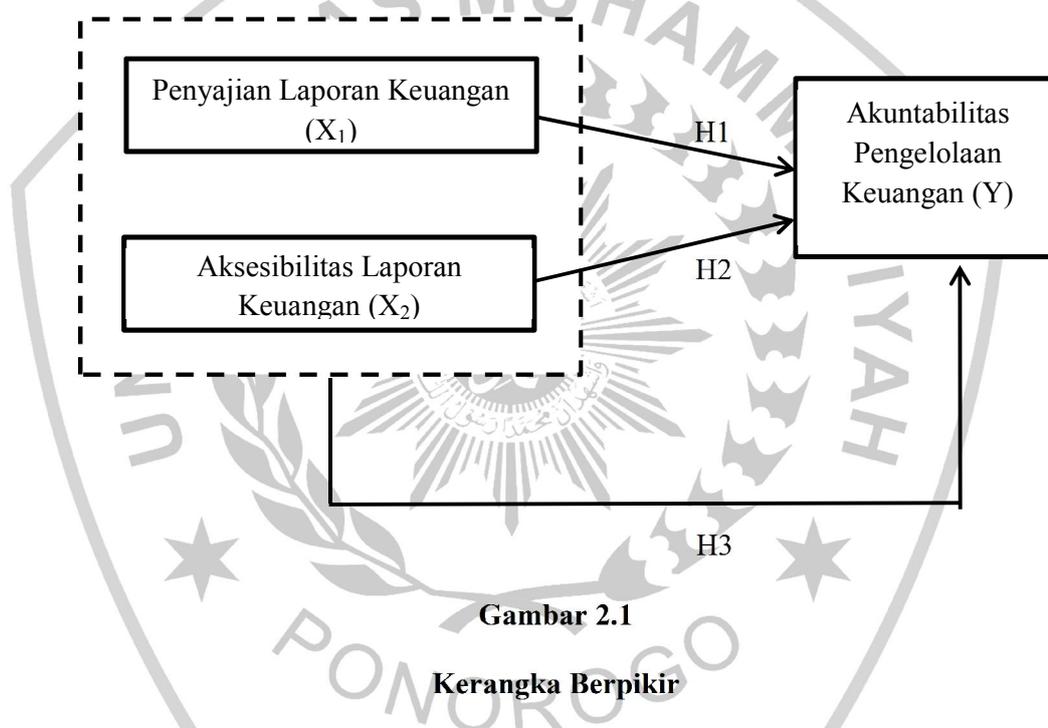
Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Hasil
1	Budi Mulyana / 2003	Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

2	Peggy Sande / 2013	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat)	Hasil penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3	Apriliani, dkk (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)	Hasil penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik secara parsial dan simultan.
4	Somad (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

		Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang)	
--	--	---	--

### 2.3 Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Berpikir**

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Sande, 2013).

Demokrasi yang terbuka dapat diakses melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan *website*, dan forum yang

memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shande dan Bennet, 2004).

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Mardiasmo, 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggungjawab.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Sande, 2013).

Nurhayani (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian milik Sande (2013) menyatakan Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya suatu laporan keuangan akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris diatas, maka dapat dibangun hipotesis :

**H<sub>0</sub><sub>1</sub> : Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo**

**Ha<sub>1</sub> : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo**

#### **2.4.2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 21 Tahun 2010). Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami.

Demokrasi yang terbuka dapat diakses melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan *website*, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shande dan Bennet, 2004). Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkan, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Sande (2013) menyatakan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya aksesibilitas laporan keuangan akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris diatas, maka dapat dibangun hipotesis :

**H<sub>0</sub> : Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo**

**H<sub>a</sub> : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo**

### 2.4.3. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Demokrasi yang terbuka dapat diakses melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan *website*, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shande dan Bennet, 2004). Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan

sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Sande, 2013).

Sande (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris diatas, maka dapat dibangun hipotesis :

**H<sub>03</sub> : Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo**

**H<sub>a3</sub> : Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo**